

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Hukum

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditam.
- Abdullah, E. and Johariani. (2023). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Ngaglik, Sleman: Deepublish.
- Amalia, Mia, et al. (2023) *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia.
- ALI, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. Hiariej,
- Bonger, W. A. (2019). *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Chazawi, Adami. (2017). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kejahatan terhadap Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gosita, Arif. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2014). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. (2019). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johnny. (2015). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartono, Kartini. (2014). *Patologi Sosial: Jilid II – Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2015). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. Surakarta: Oase Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. (2017). Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, Djoko. (2014). Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.
- Rahayu, Derita Prapti. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeparman, Edi. (2014). Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
- Suharto, Edi. (2014). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Sholeh, A.N. (2013). Detik-Detik Perlindungan Anak: Esai-Esai tentang masalah Anak Indonesia. Depok: Pena Nusantara.
- Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Susanti, Dyah Ochtorina, et al. (2022). Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2017. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Ambarita, N. E. (2024). Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pelaku *Incest* Dalam Hukum Pidana.

- Angin, A. S. B. P., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid. Sus/2021/Pn Sgr). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 145-161.
- Anan, A. M. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Perkara No 56/Pid. Sus/2023/Pn. Smg) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Darmakanti, N. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1-17.
- Fahira, Dwi. (2021). "Kekosongan Hukum terhadap Perbuatan *Incest* dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, (2), 115–128.
- Falah, Nabilah. "Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah)."
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1-10.
- Hamdani, T. R. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Dalam Lingkungan Keluarga Sedarah (*Incest*) (Studi Putusan No. 28/Pid. B/2013/Pn. Medan) (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).
- Hadi, I. G. A. A., and Gusti Ayu Apsari. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Kertha Patrika* 39.01 (2017): 33-46.
- Kusuma, P. R. A., & Sanjaya, D. B. (2024). Analisis Pasal 100 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(3).

- Lestari, Dwi. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana *Incest* dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49, (3), 455–470.
- Mulyani, Dewi. (2020) "Analisis Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Incest*." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, (2), 89–103.
- Nugroho, Dwi Handoko. (2021). "Pendekatan Yuridis terhadap Kekosongan Norma Hukum dalam Pengaturan Kejahatan Seksual." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, (1), 47–61.
- Parwati, N. P. E. (2024). Tantangan Sistem Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 5(2), 98-114.
- Putri, Nanda R. (2021). "Analisis Hukum terhadap Kekosongan Norma dalam Pengaturan Hubungan Seksual Sedarah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Humaniora*, 12 (2), 87–102.
- Rustina, R. (2022). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 244-267.
- Saputra, K. D., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2021). Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 817-826.
- Saputra, R. (2020). "Kekosongan Hukum dalam Penegakan Delik Kesusilaan: Analisis terhadap Pasal 294 KUHP." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8, (1), 15–29.
- Sari, A. F. (2025). Tanggungjawab Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pn Jambi Nomor 44/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Jmb) (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Tambunan, N. E. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)(Studi Putusan No. 15/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Kot).

Utama, K. G. A. J., Hartono, M. S., & Sanjaya, D. B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 97-109.

Wulandari, F. (2022). “Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19,(2), 101–117.

Nugraha, A. (2023). “Reformasi Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif KUHP Baru.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen*, 12(1), 55–70.

Sumber Internet / Lembaga Resmi

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). Laporan Tahunan: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dan Tantangan Implementasi UU TPKS. Diakses dari <https://lpsk.go.id>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://jdih.kemenkumham.go.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (UU PKDRT).

